



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMIR MUHAIMIN**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT EKSEKUTIF DIREKSI**
3. NHK : **419032**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.791.755.364**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/88 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.756.755.364

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 836.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, SMOOTH TEMPUR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 93.305.594****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 29.588.747**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.750.649.705
III. HUTANG	Rp.	1.460.587.220
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.290.062.485

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.